

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Q.S At-Taubah : 105.

B. Buku

Andika Wahyu Wibowo dan Ida Bagus Rai Djaja, “*Kendala Perizinan Penanaman Modal Asing di Indonesia*,” Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universiti Udayana, 2013.

Bambang Hartoyo, *Reformasi Praktik Kenotariatan di Indonesia dalam Perspektif Konvensi konvensi Internasional*, 2019.

Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, Dan Pelaksanaannya*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.

Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2022.

Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).

Mochd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty, 1990.

Mohtar Mas’oed, *Perbandingan Sistema Politik*, Cetakan Ke-16, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016).

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.

R.Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Sudargo Gautama, *Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Alumni, Bandung, 1978).

Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 2002).

C. Jurnal

Ahmad Haris Junaidi, "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, volume 7, nomor 2, Agustus 2018.

Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.

Ara Annisa Almi, "Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, volume 2, nomor 2, Juli-Desember 2022.

Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000.

Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4* (Oktober-Desember 2015).

Galuh Puspaningrum, "Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris," *Diversi Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2018).

Isaa Ismail, "Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah," *Journal POLITIKA*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2014).

Iskandar Muda, "Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasan dalam Satu Naskah Beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait", *Jurnal*, 2021.

- Mohammad Ryan Bakry, *Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Jurnal Pro Justisia* , *Yuridika* , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).
- Priskila, Pratita Penasthika., *Urgensi Akses Bagi Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*.
- Riski, “*Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah*,” *Jurnal Akta Yudisia* 5, no. 2 (2020).
- Rasyid Tanjung, *et.al*, “*Kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi*”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*, *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2022 .
- Soenaryo Cipta, “*Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang*,” *Jurnal Universitas Sumatera Utara*.
- Unggul Basoeky, *Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia*, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* Volume 4, Nomor 2, May 2021.
- Wahana Grahawan Manurung et al, “*Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal*,”*USU Law Journal*, Vil.1 No.1, 2013
- Zulfa Djoko Basuki, “*Kemungkinan Indonesia Mengakses The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents*”, 2020.

D. Sumber lainnya dan Internet

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Gardner, M. (2017). Pensiunnya Forum Non-Conveniens. NYUL Rev “*Aplikasi Legalisasi Elektronik,*” Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri Kementrian Hukum dan HAM, Naskah Urgensi Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, 2019.

Suede Nazar, “*Indonesia Mungkin Tidak Lagi Menerlukan Legalisasi Dokumen Publik Asing,*” Bola Madura, 2021.

<https://katadata.co.id/agung/berita/63620c0a8a173/memahami-5-teori-kedaulatan-dan-penjelasannya> diakses pada tanggal 25 April 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/seluk-beluk-mekanisme-apostille-di-indonesia-lt62dfc2cd52c4b> diakses pada tanggal 11 April 2023.

<https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html> diakses 23 Maret 2023.

<https://123dok.com/article/teori-implementasi-hukum-tinjauan-pustaka.4yrp57jq> diakses 23 Maret 2023.

<http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html> diakses 23 Maret 2023.

Website Kemenkum HAM RI www.ahu.go.id, diakses pada 19 Februari 2023

Zulfa Djoko Basuki, “*Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,*” BPHN.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3038K/PDT/1981

Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 2